

**PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIPENGARUHI OLEH  
PEMERIKSAAN PAJAK DAN SPT MASA  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)**

**VALUE ADDED TAX RECEIPTS ARE INFLUENCED BY TAX AUDITS AND  
PERIOD NOTIFICATION LETTERS  
(The Case Study On The Tax Office Pratama Bandung Cibeunying)**

**Pembimbing:  
Dr. Surtikanti, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

**Oleh:  
Hendra  
21114181**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Komputer Indonesia  
Email: [hendra.dw91@gmail.com](mailto:hendra.dw91@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determinan the effect of Value Added Tax (PPN) Influenced by Tax Examination and Notification Letter (SPT) Period on Pratama Bandung Cibeunying Tax Service Office for the period (2015-2017).*

*In this study using descriptive and verification methods with quantitative approaches. Testing the statistics used are multiple linear regression analysis, correlation analysis, dererminant coefficient analysis, hypothesis testing (t test).*

*The results of the study show the influence of Tax Examination on Value Added Tax Receipts (VAT) and Periodic Tax Return (PTR) Period on Value Added Tax Receipts (VAT) at the Pratama Bandung Cibeunying Tax Service Office for the period 2015-2017.*

**Keywords: Value Added Tax Receipts, Tax Audit and Period Notofication Letter**

**I. Pendahuluan**

**Latar Belakang Penelitian**

Negara dalam melindungi dan mengatur negaranya harus menjalankan fungsi dengan baik. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8)

Pembangunan nasional di Indonesia diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik meteril maupun spiritual. Untuk dapat

merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber nana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2014:2)

Penerimaan pajak dipungut dan dikelompokan kepada pajak pusat, bead an cukai, pajak daerah, maupun redistribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Penertapan jenis pajak masuk kedalam pungutan pajak pusat atau pajak daerah didasarkan pada prinsip keadilan. Walupun pungutan pajak dilakukan oleh

pusat, pada akhirnya penerimaan tersebut akan membiayai belanja daerah melalui distribusi penerimaan pusat dan daerah. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH), Bea Materai (BM), penerimaan negara yang berasal dari migas (Pajak Migas), dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Siti Kurnia Rahayu, 2017:49.)

Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak (Dedi Rudaedi, 2012) mengatakan bahwa Jumlah PKP terus meningkat per 31 Desember 2011. Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdata sekitar 700.000 Pengusaha Kena Pajak, mengalami peningkatan dari posisi April 2011 sebanyak 684 Pengusaha Kena Pajak. Dalam setiap tahun Pengusaha Kena Pajak meningkat rata-rata sebanyak 10.000-20.000. Dari 700.000 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar kurang dari separuhnya, hanya 42 persen atau sekitar 290.000 yang patuh melaporkan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (Dedi Rudaed, 2012).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP (Hestu Yoga Saksama, 2017), pada periode 2016-2017, jumlah kasus faktur pajak fiktif yang ditangani Kantor Pusat DJP mencapai 525 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1,01 triliun, serta 216 kasus yang berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan. DjP kemerkeu telah menonaktifkan sertifikat elektronik dari 1.049 wajib pajak (WP) dan terindikasi merupakan penerbit faktur pajak tidak sah dan berpotensi merugikan penerimaan pajak, maka pajak yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak masukan (Hestu Yoga Saksama, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerimaan Pajak**

## **Pertambahan Nilai yang dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan SPT Masa.**

### **Rumusan Masalah**

- 1). Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- 2). Seberapa besar pengaruh SPT Masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai

### **Tujuan Penelitian**

- 1). Untuk mengetahui besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPN.
- 2). Untuk mengetahui besar pengaruh SPT Masa terhadap Penerimaan PPN.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) definisi pemeriksaan pajak adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **SPT Masa**

Menurut Siti Resmi (2014:43) SPT Masa adalah Surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.

### **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Chairil Anwar (2016:22) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau

jasa dalam peredarannya dari produsen atau konsumen.

#### **Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak.**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:222) Pemeriksaan Pajak yang menghasilkan Ketetapan Pajak Kurang Bayar tentunya memberikan pengaruh kepada peningkatan potensi penerimaan pajak pertambahan nilai.

#### **Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh SPT Masa.**

Menurut Rinsky K (2015:66) SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh wajib pajak karena penerimaan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh wajib pajak bisa dilihat dari surat pemberitahuan yang diserahkan kepada KPP setempat. Salah satunya yaitu dari SPT Masa PPN yang diberikan, SPT Masa PPN adalah sarana bagi pengusaha kena pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya.

#### **Hipotesis**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

- H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- H2: SPT Masa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif

#### **Operasionalisasi Variabel**

Disini yang merupakan variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak dan SPT Masa.

Yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data-data yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying selama 3 tahun terakhir dari tahun 2015 s/d tahun 2017.

#### **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini berupa data bulanan selama 3 tahun, dengan total 36 data terkait jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan spt masa dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2015-2017.

#### **Penarikan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini berupa adalah data bulanan selama 3 tahun, dengan total 36 data jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar, jumlah wajib pajak yang menyampaikan spt masa dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2015-2017.

#### **Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Jl.Punawarman No.21 Bandung 40117.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tabel 4.1 nilai rata-rata pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2015-2017 dimana rata-rata jumlah surat

ketetapan pajak kurang bayar tertinggi yaitu pada tahun 2016, sedangkan jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar terendah terjadi pada tahun 2017.

Berdasarkan tabel 4.2 nilai rata-rata SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2015-2017 dimana rata-rata jumlah surat wajib pajak yang menyampaikan spt masa tertinggi terjadi pada tahun 2016, sedangkan jumlah surta wajib pajak yang menyampaikan spt masa terendah terjadi pada tahun 2017.

Berdasarkan tabel 4.4 nilai rata-rata penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2015-2017 dimana rata-rata jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016, sedangkan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai terendah terjadi pada tahun 2017.

#### **Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak**

Dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Didukung oleh teori dari Siti Kurnia Rahayu (2017:280) Pemeriksaan Pajak yang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tentunya memberikan pengaruh kepada peningkatan potensi penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kemudian dari Analisis Koefisien Determinasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Pemeriksaan Pajak sebesar 13,24% sedangkan sisanya 86,76% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pencairan tunggakan pajak, penghindaran pajak, sanksi administrasi, penagihan pajak, dan lain-lain. Dimana ketika semakin banyak aparat pajak yang

melakukan pemeriksaan pajak atas SKPKBnya maka akan meningkatkan pula Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai begitu juga sebaliknya ketika aparat pajak sedikit yang melakukan pemeriksaan pajak atas SKPKB maka akan menurun pula Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Dewi (2014), dan Wulandari (2014) yang melihat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin baik dan berkualitasnya pemeriksaan pajak maka semakin meningkatnya potensi penerimaan PPN

#### **Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dipengaruhi oleh SPT Masa**

Dalam pengujian hipotesis menunjukkan hipotesis diterima. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa SPT Masa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal mendukung teori Siti Kurnia Rahayu (2017:272). Menjelaskan bahwa pengertian SPT masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari hasil Koefisien Determinasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap SPT Masa sebesar 22,84% sedangkan sisanya 77,16% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, surat paksa, intensifikasi pajak, dan lain-lain. Maka masalah yang terjadi SPT Masa rendah disebabkan oleh kurang sadarnya masyarakat akan pajak serta berkurangnya pendapatan tetap masyarakat sehingga enggan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak. Dimana semakin banyak WP

melaporkan Surat Pemberitahuan Masa akan ikut meningkat juga Penerimaan Pajak Peratambahan Nilai, begitu pula sebaliknya ketika Surat Pemberitahuan Masa menurun maka Penerimaan Pajak Peratambahan Nilai, pun akan ikut menurun.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  adalah  $t_{hitung}$  adalah  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,007 > 2,002$ ), sehingga pada tingkat kekeliruan 5%  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel pendapatan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Nurrokhman (2014) yang menyatakan bahwa Jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian dari Apik Aji Masithoh (2013) yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1). Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan Kategori hubungan yang tergolong sedang dan bertanda positif artinya, dimana ketika semakin banyak aparat pajak yang melakukan pemeriksaan pajak atas SKPKBnya maka akan meningkatkan pula Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai begitu juga sebaliknya.

2). Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dimana semakin banyak WP melaporkan Surat Pemberitahuan Masa akan ikut meningkat juga Penerimaan Pajak Peratambahan Nilai, begitu pula sebaliknya.

## Saran

### Saran Operasional

Diupayakan untuk ditingkatkan lagi sosialisasi kepada wajib pajak agar melaporkan SPT Masa meningkat. Diharapkan semakin banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Masa maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat pula.

### Saran Akademis

Bagi pengembang ilmu hasil penelitian yang telah dilakukan ini, dapat menjadi wawasan Ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi pengembang ilmu khususnya pada bidang Akuntansi Perpajakan terutama yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak dan SPT Masa

## DAFTAR PUSTAKA.

- Herry Barus.2018, DJP Kemenkeu menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 Wajib Pajak (WP) dan terindikasi merupakan penerbit faktur pajak tidak sah dan berpotensi merugikan penerimaan pajak. <http://www.industry.co.id/read/24310/djp-nonaktifkan-1049-wp-penerbit-faktur-ilegal>
- Narita Indrastiti. 2012. Banyak fiktif, pengusaha wajib registrasi ulang mulai febuari 2012. <https://nasional.kontan.co.id/news/banyak-fiktif-pengusaha-wajib-registrasi-ulang>
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi offset, Yogyakarta.
- Resmi Siti. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Rimsky K.Judisseno. 2015. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi Siti. 2012. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Resmi. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandar dized Residual
N	36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean .0000000 Std. Deviation .47091285
Most Extreme Differences	Absolute .142 Positive .142 Negative -.128
Kolmogorov-Smirnov Z	.142
Asymp. Sig. (2-tailed)	..200 <sup>c,d</sup>

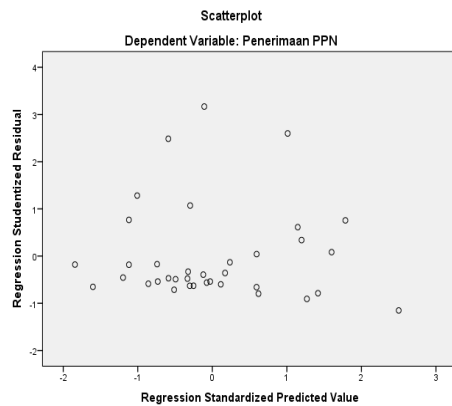
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemeriksaan_Pajak	.875	1.143
SPT Masa	.875	1.143

a. Dependent Variable: Penerimaan\_PPN

**Gambar 4.5**  
**Grafik Scatterplots**



**Tabel 4.10**  
**Koefisien Korelasi Pemeriksaan Pajak**  
**dengan Penerimaan Pajak**  
**Pertambahan Nilai (PPN)**

**Correlations**

	Pemeriksaan Pajak	Penerimaan PPN
Pemeriksaan_Pajak	1	.364
Correlation		
Significance (2-tailed)		.001
N	36	36
Penerimaan_PPN	.364	1
Correlation		
Significance (2-tailed)	.001	
N	36	36

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2018

**Tabel 4.11**  
**Koefisien Korelasi SPT Masa dengan**  
**Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**  
**(PPN)**

**Correlations**

	SPT Masa	Penerimaan PPN
SPT Masa	1	.478
Pearson Correlation		
Significance (2-tailed)		.004
N	36	36
Penerimaan_PPN	.478	1
Pearson Correlation	.478	
Significance (2-tailed)	.004	
N	36	36

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2018